

B u l e t i n



PARLEMENTARIA

KETUA
Kepercayaan
Rakyat
Jadi Kekuatan
Polri

Kawal Percepatan Pembangunan Enggano

KORKESRA
Perkuat Perlindungan
dan Pemberdayaan
Perempuan

Nomor 1350/I/VII/2025 Juli 2025



9 772614 339005



Kawal Percepatan Pembangunan Enggano



FOTO: EKI/AHA

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda melakukan peninjauan bersama tim di Bengkulu.

Komisi V DPR RI meminta seluruh pihak terkait untuk menjalankan mandat Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai secara holistik dan cepat, yang tidak berfokus pada solusi jangka pendek. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menekankan bahwa semangat Inpres adalah menuntaskan seluruh persoalan di

pelabuhan tersebut hingga tuntas sebelum batas waktu 31 Agustus 2025.

“Inpres ini amanatnya tidak hanya kapal masuk dan bisa keluar, Inpres ini semangatnya holistik. Semua problem terkait dengan Pulau Baai ini dituntaskan,” kata Syaiful Huda dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Bengkulu, Kamis (3/7).

Untuk mengejar tenggat waktu yang terbatas, Huda mendesak

Pelindo untuk mempercepat proses pengerukan di alur pelabuhan Pulau Baai dengan menambah kapasitas kerja. “Saya termasuk menyarankan dan usulkan supaya Pelindo nambah sebanyak-banyaknya alat berat untuk pengkondisian pengerukan,” tegasnya.

Menyetujui masukan dari Wakil Gubernur Bengkulu, Syaiful Huda juga mendorong agar pekerjaan dilakukan secara simultan untuk mencegah longsor kembali dan memaksimalkan waktu yang ada. Huda juga mengingatkan bahwa Inpres ini merupakan mandat level tertinggi yang menuntut koordinasi penuh antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pelindo, dan ASDP.

Perlu diketahui, Pelabuhan Pulau Baai merupakan akses jalur laut untuk menuju Pulau Enggano. Kondisi terkini terjadi pendangkalan pada alur dari dan ke Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi ini membuat distribusi logistik ke Pulau Enggano menjadi terhambat. Akibat kondisi tersebut, harga komoditas di Pulau Enggano meningkat 30 - 50 persen.

— eki/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Kepercayaan Rakyat Jadi Kekuatan Polri



Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke-79 di Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke-79. Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara, serta para pejabat tinggi negara, jajaran TNI-Polri, dan tokoh nasional lainnya.

Dalam peringatan hari jadi Polri tahun ini, Puan menyampaikan bahwa polisi harus semakin dekat dengan rakyat dan menjadikan keadilan sosial sebagai arah utama pelayanan.

“Kekuatan sejati Polri tidak terletak pada kewenangan atau senjata, tetapi pada kepercayaan

rakyat. Polri harus semakin dekat dengan masyarakat dan menjadikan keadilan sosial sebagai arah utama dalam pelayanan,” kata Puan, Selasa (1/7).

Puan pun berharap agar tema Hari Bhayangkara tahun 2025 yakni ‘Pelayanan Polri untuk Masyarakat’ dapat dimaknai secara mendalam sebagai arah kebijakan, bukan hanya sebagai slogan.

“Rakyat tidak hanya butuh rasa aman, tetapi juga keadilan yang menyentuh kehidupan sehari-hari mereka dari persoalan kecil di kampung hingga kejahatan struktural,” tuturnya. **aha**



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Prima Danutirto, A.Md.
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purnito Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmim Nabila

FOTOGRAFER
Naefuroli, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moernpoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL
Muhammad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifiq Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapanya



Perkuat Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan



FOTO: UF/PDT

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam acara Fatayat NU di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/7/2025).

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan komitmen parlemen dalam memperkuat peran serta perlindungan perempuan melalui regulasi yang inklusif dan berpihak. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara Fatayat NU untuk menyosialisasikan kebijakan dan regulasi yang menyentuh langsung kehidupan perempuan di masyarakat, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/7).

Cucun menyampaikan bahwa negara tidak boleh absen dalam menjamin hak-hak dasar perempuan, terutama selama masa kehamilan dan pengasuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan, yang dikenal sebagai masa krusial

dalam tumbuh kembang generasi bangsa.

“Negara harus hadir memproteksi perempuan, termasuk hak atas cuti melahirkan yang tidak boleh mengurangi status dan hak

kerja mereka. Hak perempuan untuk hamil, melahirkan, dan membesarkan anak tidak boleh dibenturkan dengan ruang kerja dan produktivitas,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Ia merujuk pada Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang disahkan DPR RI sebagai bentuk konkret keberpihakan negara terhadap perempuan dan anak. Cucun menambahkan bahwa perlindungan perempuan tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan dan ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut keamanan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan yang masih tinggi menjadi perhatian serius DPR. Karena itu, kami terus mengawal implementasi regulasi yang telah disahkan, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, agar benar-benar melindungi korban dan memberi efek jera bagi pelaku,” jelasnya. — **uf/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Kesiapan Pemekaran Korem 031



FOTO: PRIMA
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukanta (kanan) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Markas Korem 031/Wira Bima di Pekanbaru, Riau, Kamis (3/7/2025).

Komisi I DPR RI menaruh perhatian serius terhadap rencana pemekaran Korem 031/Wira Bima menjadi

Komando Daerah Militer (Kodam) XIX. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukanta saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Markas Korem 031/Wira Bima di

Pekanbaru, Riau, Kamis (3/7).

"Ini langkah penting. Kami ingin memastikan bahwa pemekaran ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar siap dilaksanakan. Tadi Pak Danrem menyampaikan paparan yang sangat rinci, mulai dari kondisi existing hingga analisa kelebihan dan kekurangan seluruh fasilitas, sarana-prasarana, personel, bahkan aspek material maupun non-material," jelas Sukanta.

Politisi Fraksi PKS tersebut menambahkan, hasil kunjungan ini menjadi masukan strategis bagi Komisi I DPR RI. "Minggu depan kita memasuki fase penting, yaitu pembahasan anggaran bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala-Kepala Staf. Apa yang kami lihat dan dengar di lapangan hari ini akan sangat menentukan arah kebijakan kami di Senayan," tambahnya.

Dukungan terhadap pemekaran Kodam XIX dinilai penting untuk memperkuat pertahanan di wilayah strategis Sumatera yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional.

"Kami ingin memastikan bahwa Riau dan wilayah sekitarnya memiliki komando militer yang lebih responsif dan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan di era global saat ini," pungkasnya.

pdt/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Risiko Lemahkan Diplomasi Strategis Indonesia



FOTO: ARR/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menlu Sugiono, Senin (30/6/2025).

Kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai sorotan dari Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Dalam forum rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menlu Sugiono, Amelia menekankan bahwa kekosongan pos strategis tersebut dapat berdampak serius terhadap posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

"Kita ketahui bahwa pos Dubes RI untuk Amerika dan PBB ini kosong. Padahal Washington dan New York adalah simpul penting dalam diplomasi global. Kekosongan ini tentu berisiko melemahkan diplomasi strategis

Pentingnya penguatan diplomasi energi Indonesia, terlebih di tengah ketegangan geopolitik

Indonesia, apalagi di tengah perubahan geopolitik yang begitu cepat," ujar Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menlu Sugiono dengan agenda "Kondisi Geopolitik dan Perlindungan WNI di Luar Negeri" yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/6).

Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut mempertanyakan kendala yang menyebabkan belum terisinya

dua pos penting tersebut. Menurut Amelia, absennya kehadiran Indonesia dalam diplomasi tingkat tinggi juga menyebabkan keterbatasan dalam menyuarakan kepentingan nasional, termasuk dalam merespons isu-isu strategis yang dikeluarkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Selain itu, Amelia juga menyoroti pentingnya penguatan diplomasi energi Indonesia, terlebih di tengah ketegangan geopolitik yang berdampak terhadap harga minyak global. Ia menyebut kawasan seperti Selat Hormuz, Laut Merah, hingga Laut Natuna Utara sebagai titik-titik panas yang memerlukan perhatian ekstra dari perspektif ketahanan energi nasional. **pun/rdn**



Regulasi Tata Ruang Tumpang Tindih

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai regulasi terkait penataan ruang atau RDTR (rencana detail tata ruang) masih tumpang tindih. Sehingga tidak sedikit investasi yang sulit masuk karena tumpang tindih regulasi tersebut.

Oleh karenanya ia mengusulkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) membuat surat keputusan bersama (SKB) dengan kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Boleh tidak ya saya mengusulkan agar dibuat sebuah

Regulasi terkait penataan ruang atau RDTR (rencana detail tata ruang) masih tumpang tindih. Sehingga tidak sedikit investasi yang sulit masuk karena tumpang tindih regulasi tersebut.

apakah MoU atau SKB tiga menteri, terkait penataan tata ruang, karena kalau kita lihat ini ujungnya RDTR tata ruang," ujar Dede dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN,

Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).

Menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, SKB dapat diinisiasi oleh Kementerian ATR untuk menangani masalah investasi. Bahkan jika perlu ada Kemenko Infrastruktur juga dilibatkan, karena konteksnya investasi membutuhkan lahan.

Sementara itu, terkait polemik jual beli pulau yang banyak ditemukan di situs online yang dikelola perusahaan internasional, pihaknya meminta Kementerian ATR melakukan aksi konkret mengatasi hal tersebut.

"Minimal dari ATR berkomentar atau teguran langsung, jadi supaya harus ada sesuatu yang dilakukan. Karena mencabut izin perusahaan tersebut kan nggak bisa. Paling tidak, bisa dilakukan sesuatu. Saya yakin pulau itu dijual oleh broker, bukan pemdanya," tegasnya.

— ayu/aha

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).



Distribusi Lahan Eks HGU PTPN



Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sumut, Kementerian ATR/BPN, Kakanwil BPN dan Bupati/Walikota di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (3/7/2025).

Komisi II DPR RI menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan distribusi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN di Sumatera Utara kepada masyarakat. Namun, upaya ini masih terhambat

oleh sejumlah kendala administratif dan regulasi yang berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI yang memimpin kunjungan kerja tersebut, Rifqinizamy Karsayuda, dijelaskan bahwa saat ini terdapat hampir 6.000

hektar lahan eks HGU milik PTPN yang tersebar di Sumatera Utara. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menunjukkan keinginan kuat untuk mendistribusikan lahan-lahan tersebut kepada masyarakat. Namun, proses tersebut terganjal beberapa persoalan utama.

“Pertama, lahan eks HGU yang masih tercatat sebagai aset BUMN hanya bisa dilepas jika ada kompensasi atau ganti rugi. Ini tentu sangat memberatkan, apalagi bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Rifqi saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sumut, Kementerian ATR/BPN, Kakanwil BPN dan Bupati/Walikota di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (3/7/2025).

Bang Rifqi, sapaannya, mengatakan meskipun masa HGU sudah berakhir, lahan tersebut tetap tercatat sebagai aset negara yang dimiliki oleh BUMN, sehingga secara administratif masih dianggap sah secara hukum dan tidak dapat langsung dialihkan.

“Dan yang kedua, kendati kemudian HGU nya sudah habis ini masih dicatatkan sebagai aset BUMN yang kemudian seolah olah mendapatkan legalitas formil di mata negara,” ucapnya. **mfn/aha**



Keringanan Hukum bagi *Justice Collaborator*

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya pengakuan dan penghargaan hukum terhadap peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Menurut Rikwanto, keberadaan *justice collaborator*, saksi mahkota, maupun whistleblower merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

proses penegakan hukum dalam kasus pidana.

"*Justice collaborator* itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam kasus pidana, selalu ada kemungkinan seseorang menjadi saksi mahkota, *justice collaborator*, atau *whistleblower*," ujarnya kepada Parlementaria, di Mapolda DIY, Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (2/7).

Ia menjelaskan bahwa setiap *justice collaborator* memiliki latar belakang dan tahapan berbeda dalam proses penyidikan. Ada yang sejak awal secara sukarela mengaku terlibat dan melapor, ada pula yang menyadari kesalahannya di tengah proses penyidikan, dan ada juga yang ditawarkan oleh penyidik untuk

berperan sebagai *justice collaborator* karena dinilai mampu mengungkap kebenaran.

"Semua ada tahapannya. Ada yang sejak awal sadar dan melapor, ada yang di tengah penyidikan merasa harus ungkap semuanya, ada juga yang diajak penyidik. Masing-masing harus diberi penghargaan secara hukum," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa peran sebagai *justice collaborator* tidak menghapus hukuman. Namun, hakim dapat mempertimbangkan keringanan hukuman sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam membongkar perkara. — **skr/rdn**



Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto usai pertemuan di Mapolda DIY, Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (2/7/2024).

Keadilan Restoratif Pulihkan Hak Korban

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menegaskan bahwa konsep keadilan restoratif (RJ) yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) harus menempatkan pemulihan hak korban sebagai elemen utama. Menurutnya, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi pelaku dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari pemulihan martabat dan kerugian yang dialami korban.

“Korban harus menjadi perhatian utama. Karena dalam banyak kasus, korban merasa tidak mendapatkan keadilan, terutama jika kerugian yang dialami tidak dipulihkan. Dalam KUHP baru nanti, hal ini harus menjadi prinsip utama RJ,” ujar Benny usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Bandung, Kamis (3/7).

Ia menjelaskan bahwa selama ini, penerapan RJ sering kali hanya dilihat dari ukuran nominal kerugian, tanpa memperhatikan aspek pemulihan korban secara menyeluruh. Misalnya, perkara dengan kerugian di bawah Rp2,5 juta secara otomatis tidak diproses ke pengadilan, sesuai aturan internal di kepolisian. Padahal, korban mungkin tetap mengalami kerugian psikologis maupun moral.

“Kalau pelaku mencuri sesuatu, meskipun nilainya kecil,

Keadilan tidak hanya dilihat dari sisi pelaku dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari pemulihan martabat dan kerugian yang dialami korban.

korban tetap mengalami rasa tidak adil. Itu harus dipulihkan dulu, misalnya dengan mengganti

kerugiannya. Baru bisa dianggap selesai secara restoratif,” jelas legislator dari Dapil Sumatera Barat II itu.

Benny juga menyoroti pentingnya KUHP baru sebagai satu-satunya rujukan hukum untuk RJ agar tidak ada lagi perbedaan tafsir antar lembaga penegak hukum. “Sehingga KUHP harus menjadi satu-satunya pedoman nasional agar keadilan untuk korban dan tersangka bisa berjalan seimbang,” pungkasnya. — **aha**

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Bandung, Kamis (3/7/2025).



FOTO: AHA/PDT



Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (4/7/2025).

Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) yang menjangkiti hewan ternak kembali merebak di beberapa daerah Indonesia.

Seiring dengan hal tersebut maka kebutuhan akan vaksin juga meningkat. Pemerintah daerah dan pusat terus berupaya mengatasi kekurangan vaksin dengan berbagai cara, termasuk pengadaan vaksin secara mandiri dan mempercepat distribusi vaksin yang sudah ada.

Kendala dan tantangan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan vaksin ini membutuhkan sikap tegas dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Mulai dari Kementerian Pertanian hingga Badan Karantina Indonesia. Penanganan PMK membutuhkan kerja sama dan kesinergisan lintas sektoral karena sifatnya lintas kewenangan dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Keterbatasan anggaran untuk pengadaan vaksin PMK menjadi

Tambahan Anggaran Vaksin PMK

salah satu faktor yang ikut memengaruhi tidak terpenuhinya jumlah vaksin yang diperlukan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, Komisi IV akan mendorong agar pemerintah untuk dapat mengalokasikan anggaran dalam upaya pemenuhan kebutuhan vaksin PMK ini.

“Sekian puluh tahun yang lalu Indonesia telah bebas dari PMK, namun sayangnya tahun 2022 kita kembali menjadi negara yang masih ada PMK. Untuk itu kita akan berupaya mendorong terkait

anggarnya,” tutur Daniel dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/7).

Ia memaparkan, dari 11 juta sapi yang ada di Indonesia, sebanyak 7 juta ekor sapi perlu divaksin. Dan jumlah 7 juta ekor sapi itu membutuhkan 14 juta vaksin. Sementara saat tahun ini pemerintah baru menganggarkan untuk 4 juta vaksin. “Sehingga kita kekurangan 10 juta vaksin. Ini yang harus kita pikirkan bersama, karena ini menjadi program yang urgen,” tandas Politisi Fraksi PKB ini.

 **dep/rdn**



Bypass Padang Jalur Vital Perkotaan



FOTO: WE/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda saat meninjau langsung kondisi jalan dalam kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Kamis (3/7/2025).

Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur Jalan Bypass Padang guna mengantisipasi lonjakan aktivitas lalu lintas dan mendukung pengembangan wilayah pasca penetapan zona merah tsunami di sebagian wilayah Kota Padang.

Zigo menjelaskan bahwa perubahan pola hunian masyarakat dan arah pengembangan kota ke kawasan yang lebih aman dari ancaman tsunami telah mengakibatkan lonjakan penggunaan Jalan Bypass Padang, yang semula dirancang untuk kendaraan barang, kini menjadi

jalur umum yang dipadati berbagai aktivitas masyarakat.

“Kondisi di Bypass Kota Padang ini, semenjak ditetapkan sebagai zona merah potensi tsunami, banyak masyarakat dan juga pemerintah kota mengalihkan permukiman dan perkantoran ke zona hijau. Nah, zona hijau itu berada di seberang bypass, sehingga jalan ini sekarang menjadi jalur umum yang padat,” ujar Zigo usai meninjau langsung kondisi jalan dalam kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Padang, Kamis (3/7).

Dalam pertemuan dengan Wali Kota Padang, sejumlah usulan strategis disampaikan untuk menanggulangi kemacetan dan memperkuat konektivitas wilayah.

Salah satu yang menjadi fokus adalah usulan pelebaran jalan dari empat lajur menjadi enam atau bahkan delapan lajur.

Bila pelebaran tidak memungkinkan, Pemkot dan Komisi V mendorong pembangunan jalur alternatif atau jalan baru yang menghubungkan Bungus–Dubek–Belimbing–Bandar Buat.

Legislator Fraksi Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemaparan terkait studi kelayakan dan pembebasan lahan, namun menekankan perlunya pendalaman per segmen sepanjang lebih dari 27 kilometer jalur bypass yang menghubungkan Labuan Teluk Bayur hingga ke arah Bandara Minangkabau. **we/aha**



Kinerja PT Garam Masih Minim

Anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji, menilai bahwa kinerja PT Garam belum menunjukkan kemajuan signifikan meskipun telah

Laba hanya sekitar Rp20 miliar, pendapatan pun hanya sekitar Rp200 miliar. Ini sangat kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat Indonesia. PT Garam belum mencerminkan sebagai perusahaan negara yang besar dan tangguh

mendapat dukungan pemerintah selama bertahun-tahun. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Direksi PT Garam di Surabaya.

“Selama 15 tahun kami mendengar presentasi yang sama dari PT Garam. Materinya selalu serupa, namun kenyataannya kebutuhan garam dalam negeri belum bisa dipenuhi,” ujar Sarmuji

pada saat pertemuan dengan PT Garam di Hotel Sheraton Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/7).

Ia menyoroti lemahnya capaian laba dan pendapatan perusahaan. “Laba hanya sekitar Rp20 miliar, pendapatan pun hanya sekitar Rp200 miliar. Ini sangat kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat Indonesia. PT Garam belum mencerminkan sebagai perusahaan negara yang besar dan tangguh,” tegasnya.

Menurut Sarmuji, pemerintah perlu mengevaluasi kembali strategi PT Garam secara menyeluruh dan memastikan bahwa setiap anggaran dan program benar-benar membawa hasil. — **eno/aha**

Anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji, saat pertemuan dengan PT Garam di Hotel Sheraton Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/7/2025).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: ENO/PDT

Sawit Jadi Pilar Ekonomi Nasional



FOTO: GAL/PDT

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 untuk meninjau langsung perkembangan industri minyak sawit nasional sekaligus menggali potensi, tantangan, dan hambatan yang masih mengemuka di lapangan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid selaku Ketua Tim Kunjungan menegaskan pentingnya penguatan sektor sawit yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. “Industri sawit tidak hanya menopang ekspor dan ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja yang sangat besar bagi rakyat,” ujar Nurdin saat membuka kunjungan kegiatan, Kamis (3/7).

Berdasarkan data, produksi sawit nasional pada tahun 2024 mencapai 52,76 juta ton, terdiri dari 48,16 juta ton CPO dan 4,60 juta

ton CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*). Meski naik sekitar 3,8% dari tahun

Mengantisipasi tantangan global dan kebutuhan dalam negeri yang meningkat, produksi sawit pada 2025 diperkirakan naik menjadi 53,6 juta ton,

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (3/7/2025).



sebelumnya, tren produksi dalam enam tahun terakhir menunjukkan kecenderungan stagnan.

Di sisi lain, konsumsi domestik terus meningkat, terutama untuk kebutuhan biodiesel. Dari 5,83 juta ton pada 2019 melonjak menjadi 11,45 juta ton pada 2024, menunjukkan keberhasilan kebijakan pengembangan energi nabati dalam negeri.

Namun, ekspor justru menurun dari sisi volume. Pada 2019, volume ekspor mencapai 37,39 juta ton, namun turun menjadi 29,53 juta ton pada 2024. Kendati demikian, nilai ekspor tetap tinggi karena kenaikan harga pasar dunia, mencapai USD27,76 miliar atau sekitar Rp440 triliun di tahun 2024.

Mengantisipasi tantangan global dan kebutuhan dalam negeri yang meningkat, produksi sawit pada 2025 diperkirakan naik menjadi 53,6 juta ton, dengan konsumsi domestik sebesar 26,1 juta ton, termasuk 13,6 juta ton untuk program biodiesel B40. Namun, ekspor diprediksi menurun menjadi 27,5 juta ton.

gal/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tingkatkan TKDN Mobil Listrik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengapresiasi peningkatan penjualan Wuling yang semakin bagus setiap tahunnya. Ia menjelaskan saat ini Wuling masih berada di Top 4 perusahaan otomotif berbasis EV dari sisi *market share*. namun secara keseluruhan hal ini layak diperjuangkan dan didorong lebih baik lagi.

“Pangsa pasar jadi tantangan yang paling berat buat mereka.

Namun kita lihat *growth*-nya yang bagus, pertahunnya makin bagus ya. Secara umum bukan hanya Wuling, produksi otomotif Indonesia memang ekspansinya makin tahun makin bagus di negara-negara ASEAN. Jadi sejauh ini pertumbuhan penjualannya layak untuk kita perjuangkan lagi dan dorong lagi,” katanya kepada **Parlementaria** usai mengunjungi PT. SGMW Motor Indonesia, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/7).

Nunik biasa disapa, juga mengapresiasi, nilai investasi yang

diserap Wuling sebesar kurang lebih 100 juta US Dollar. Nilai ini, menurutnya, sangat besar dan wajib disyukuri, yang artinya Indonesia masih dipercaya oleh para investor di luar negeri untuk berinvestasi.

Nunik pun menjelaskan, dalam memonitoring perkembangan industri manufaktur di Indonesia seperti Wuling, pertumbuhan angka penjualan menjadi penting. Hal ini mengingat Wuling juga melakukan ekspor ke beberapa negara seperti Thailand, Nepal dan sebagainya.

“Yang juga kita monitor adalah bagaimana penerapan penggunaan komponen dalam negeri ya, dan Wuling memenuhi standar 40 persen dari komponen dalam negerinya dipenuhi, dan kita berharap itu terus dijaga,” kata Politisi Fraksi PKB ini. — **ndy/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim bersama tim saat mengunjungi PT. SGMW Motor Indonesia, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (04/07/2025).

FOTO:NDY/PDT

Kembangkan Industri Halal Dalam Negeri

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan dengan jumlah

populasi muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan industri halal. Beberapa sektor utama yang terlibat secara langsung dalam pengembangan industri halal berdasarkan *State of the Global Islamic Report (SGIER) 2022* antara lain sektor makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, pariwisata ramah muslim, serta *fashion* muslim.

Namun demikian, berbagai potensi itu harus didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi, seperti adanya kawasan industri halal,

laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, rumah potong hewan dan sarana pendukung lainnya, guna memberikan akses bagi kegiatan industri halal dalam memproduksi dan mendistribusi.

“Manakala hal ini sudah terintegrasi dengan baik, maka peningkatan kapasitas industri halal akan tercipta, dan mendorong berbagai produk halal memiliki nilai tambah yang tinggi, berdaya saing, menarik investasi, serta meningkatkan kontribusi produk halal Indonesia dalam perdagangan global,” tuturnya dalam kunjungan di Halal Industrial Park Sidoarjo, Kamis (3/7).

Sebagai pasar halal terbesar di dunia, Indonesia juga sangat berpotensi untuk menarik investasi luar negeri guna mengembangkan berbagai fasilitas industri halal dan mendorong pemenuhan pasar domestik, sekaligus meningkatkan kapasitas ekspor berbagai produk halal nasional.

“Indonesia bahkan telah diakui sebagai 10 besar negara pengekspor produk *fashion* muslim secara global. Menurut data SGIER 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-3 di dunia sebagai negara eksportir berbagai produk *fashion* muslim,” katanya.

tn/aha

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri dalam kunjungan di Halal Industrial Park Sidoarjo, Kamis (3/7/2025).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Optimalisasi Fasilitas Asrama Haji Balikpapan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, saat pertemuan komisi VIII dengan Kakanwil Kementerian agama Kalimantan Timur beserta jajaran dan Kepala UPT di Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/7/2025).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, menyampaikan apresiasi atas kondisi asrama haji Balikpapan yang dinilai sudah sangat baik. Ia bahkan menyebutkan bahwa dari seluruh asrama haji di Indonesia ada dua yang saat ini dianggap terbaik, yaitu Balikpapan dan Makassar.

"Saya lihat kondisinya sudah

baik sekali. Kita harapkan nanti dengan kondisi asrama haji yang sudah baik ini bisa dioptimalkan," ujar Singgih kepada *Parlementaria* usai pertemuan komisi VIII dengan Kakanwil Kementerian agama Kalimantan Timur beserta jajaran dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/7).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar juga mendorong

agar pengelolaan asrama haji dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda), mengingat luas lahan asrama haji Balikpapan yang mencapai hampir sembilan hektare. Ia mengusulkan agar fasilitas PLU (Penginapan Luar Umum) dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang tiga yang representatif dan mampu menghasilkan pendapatan negara.

"Di belakang asrama juga luas, dekat pantai, bisa dikembangkan jadi tempat wisata atau rekreasi. Jadi tidak hanya untuk haji, tapi juga mendatangkan manfaat ekonomi untuk daerah dan negara," terangnya.

Terkait pelayanan jemaah, Singgih menegaskan bahwa selama fase keberangkatan haji di tahun ini tidak ada keluhan berarti yang diterima. Baik dari sisi konsumsi, transportasi, maupun akomodasi, semua berjalan dengan baik. Namun demikian, ia juga menyoroti perlunya perbaikan dalam aspek pendataan dan kesehatan jemaah.

afr/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: YSM/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (3/7/2025).

Poltekkes Diminta Siapkan SDM Kesehatan Unggul

Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid, menyoroti tantangan besar dalam pemenuhan sekaligus pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya mencakup jumlah, tetapi juga menyangkut distribusi yang timpang dan tidak merata antar wilayah.

“Ada satu tantangan besar yang kita miliki hari ini. Bukan hanya soal pemenuhan, tapi juga

pemerataan tenaga kesehatan. Baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, bidan, hingga ahli gizi. Kita melihat proporsi yang tidak seimbang, ada disparitas regional yang nyata,” ungkap Gamal usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (3/7).

Ia menegaskan bahwa ketimpangan ini diperburuk oleh rendahnya tingkat retensi tenaga kesehatan di daerah terpencil, yang disebabkan oleh berbagai

faktor mulai dari minimnya fasilitas, jalur karier yang tidak menjanjikan, hingga keterbatasan anggaran.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Gamal menekankan pentingnya membangun desain pendidikan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi kebutuhan. “Ke depan, kita harus mampu menyusun desain pendidikan yang berkesinambungan, sehingga Poltekkes dan institusi pendidikan kesehatan lainnya mampu menyiapkan tenaga kesehatan yang benar-benar dibutuhkan di lapangan. Harus ada proses aligning, penyusunan program khusus untuk mensuplai kebutuhan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil,” tegasnya.

Tak hanya soal kuantitas dan distribusi, Gamal juga menekankan pentingnya penerapan future skill dalam kurikulum pendidikan kesehatan. **ysm/aha**



Tekankan Transparansi dan Bebas Politisasi



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, saat kunjungan kerja di bidang kebudayaan yang berfokus pada penulisan sejarah Indonesia di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (3/7/2025).

Komisi X DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan RI. Namun, dukungan itu disertai sejumlah catatan penting, agar proses tersebut dilakukan secara ilmiah, terbuka, dan bebas dari kepentingan politis.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, usai melakukan kunjungan kerja di bidang kebudayaan yang berfokus pada penulisan sejarah Indonesia di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (3/7).

"Komisi X mendukung penuh upaya penulisan sejarah ini, karena banyak peristiwa penting

Kita tidak bisa melihat sejarah sebagai sesuatu yang statis. Hari ini adalah fakta, dan besok bisa menjadi bagian dari sejarah.

bangsa yang selama ini belum terdokumentasikan secara utuh. Tetapi kami juga menekankan pentingnya proses yang transparan dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat," ujarnya.

Himmatul menjelaskan bahwa penulisan sejarah Indonesia merupakan agenda kebudayaan yang krusial, mengingat sejarah nasional belum diperbarui sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ia menegaskan, sejarah adalah sesuatu yang dinamis dan

terus berkembang, sehingga perlu terus ditulis agar generasi mendatang memiliki rekam jejak historis yang utuh dan objektif.

"Kita tidak bisa melihat sejarah sebagai sesuatu yang statis. Hari ini adalah fakta, dan besok bisa menjadi bagian dari sejarah. Karena itu, penulisan ulang ini sangat dibutuhkan," terang Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi X juga menerima berbagai masukan dari kalangan akademisi, penulis sejarah, dan budayawan. Beberapa sorotan yang mengemuka antara lain kurangnya sosialisasi terkait siapa saja penulis sejarah, perubahan sistematika penulisan yang belum dijelaskan secara rinci, serta kekhawatiran bahwa sejarah bisa digunakan sebagai alat politik oleh kelompok tertentu.

hal/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya

LPS akan Hadapi Mandat Baru

Anggota Komisi XI DPR RI Amin menyoroti sejumlah isu strategis yang dihadapi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi mandat barunya pasca Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan investasi surat berharga. Hal itu disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisiner LPS atas nama Farid Azhar Nasution.

“Terkait rencana penempatan investasi pada surat berharga yang dikeluarkan negara asing, saya ingin tahu kriteria seleksi negara dan instrumennya,” ujar Amin di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).

Amin mempertanyakan bagaimana langkah tersebut tetap sejalan dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Menurutnya, keputusan penempatan dana di luar negeri harus benar-benar melalui pertimbangan yang matang. “Bagaimana langkah ini bisa tetap

Menyoroti tantangan besar dalam transformasi sumber daya manusia (SDM) di LPS. Ia menilai, mandat baru yang mencakup sektor asuransi dan resolusi non-bank membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di luar sektor perbankan

sejalan dengan stabilitas sistem keuangan nasional?” tanyanya.

Selain itu, ia juga menyoroti lambatnya realisasi penyusunan regulasi turunan UU P2SK oleh LPS. Ia mencatat bahwa capaian saat ini baru sekitar 37 persen. “Ini apa langkah konkret Bapak untuk mempercepat penyusunan regulasi turunan UU P2SK, khususnya yang terkait dengan mandat baru LPS?” tegasnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS itu juga menyoroti tantangan besar dalam transformasi sumber daya manusia (SDM) di LPS. Ia menilai, mandat baru yang mencakup sektor asuransi dan resolusi non-bank membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di luar sektor perbankan. — **gal/aha**

Anggota Komisi XI DPR RI Amin saat mengikuti rapat uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisiner LPS atas nama Farid Azhar Nasution di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).



Rasio Elektrifikasi Tidak Akurat

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti akurasi data rasio elektrifikasi yang disampaikan PLN. Ia menilai angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan, khususnya di daerah pemilihannya di daerah Tuban dan Bojonegoro.

"Terkait rasio elektrifikasi ini akan selalu saya *notice* dari waktu ke waktu, masa ke masa. Sampai dengan hari ini saya ini enggak yakin dengan variabel yang digunakan untuk menyusun rasio elektrifikasi," tegasnya dalam RDP Komisi XII dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dirut PT. PLN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/6).

Ratna menilai, ini menjadi momentum yang tepat bagi DPR terutama

Komisi XII untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang

Mungkin ini adalah momentum yang baik untuk kita di sini bisa merevisi undang-undang ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009.

Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009. Menurutnya, aturan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Kalau perlu Ketua dan sahabat-sahabat Komisi XII yang lain, mungkin ini adalah momentum yang baik untuk kita di sini bisa merevisi undang-undang ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009. Saya enggak sepakat kalau misalnya rasio elektrifikasi ini tidak mendapatkan atensi khusus dari kita," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan klaim rasio elektrifikasi yang sudah hampir 100 persen di beberapa daerah. "Karena seperti kita tahu kalau misalnya Bapak tadi menyampaikan ada 100 persen di DKI, oke mungkin kita bisa sepakat lah ya, ada 100 persen di Bali oke sepakat. Tapi kalau Jawa Timur terus dibilang 99,56 persen, di dapil saya Bapak tahu sendiri 2024 aja Bapak sudah ngasih berapa tuh 1.251 dan *waiting list* masih 7.500 Pak, itu di Dapil saya Tuban Bojonegoro," ungkap Politisi Fraksi PKB ini. **gal/rdn**

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari saat RDP Komisi XII dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dirut PT. PLN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/06/2025).

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: MRI/PDT

Sinergi Lintas Sektor Hapus Praktek TPPO

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan bahwa diperlukan sinergi dan komitmen dari berbagai Kementerian dan Lembaga untuk menghilangkan praktek Tindak Pidana

“Ini persoalan yang tidak hanya di ujung, ini kan dari hulu ke hilir. Prinsipnya TPPO ini kalau orang bekerja bisa di mana saja, ke luar negeri juga boleh. Kasus yang kemarin di Myanmar dan segala macam itu sudah *human trafficking*,” ujarnya, Rabu (2/7).

pekerjaan di dalam negeri.

Di sisi lain Willy menegaskan, perlu kerja cepat dari aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk mengungkap organisasi yang menggerakkan pengiriman tenaga kerja ilegal. Lembaga seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPI) juga punya andil dalam sosialisasi.

“Imigrasi, Kepolisian, Ketenagakerjaan, BP2MI. Ini butuh kerja bersama. Kami khususnya dari Komisi XIII yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) juga bertanggung jawab untuk itu,” lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia pun berharap Kemenimipas



FOTO: NDN/PDT

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR RI ke Kota Batam, Rabu (2/7/2025).

Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Melihat fenomena banyaknya masyarakat yang mudah tergiur bekerja di luar negeri, menurutnya, harus menjadi perhatian Pemerintah. Ini menjadi tendensi bahwa masih kurangnya lapangan

bisa memberikan informasi yang lebih detail ke Komisi XIII terkait masalah ini. Kementerian dan Lembaga lain pun lanjutnya sangat membutuhkan informasi dari Kemenimipas. **ndn/rdn**





Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris bersama tim mengunjungi Poltekkes Kemenkes Semarang, Kamis (3/7/2025). Komisi IX berharap Poltekkes mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul di bidangnya. Foto: BIA/AHA





DOKUMENTER
INVESTIGASI
REFERENSI INDONESIA



TVR
PARLEMEN

TRANSFORMASI SUARA DAPIL
AKSI DEWAN
MENDENGAR - MELIHAT - MEMBANGUN

SAKSIKAN HANYA DI:

<https://tvrparlemen.dpr.go.id>



TVR PARLEMEN

EXECUTIVE PRODUCER **MEIDI NUGROHO**
PRODUCER **ADRIANUS SEPTIANTO** LINE PRODUCER **HERI HERYADI**



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri